



## **PERAN DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

**Nanda Meita Sitompu<sup>1</sup>, Yudha Mardhatillah<sup>2\*</sup>**

Pemerintah Kota Jambi<sup>1</sup>, Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>2</sup>

Email: [Nandameita1212@gmail.com](mailto:Nandameita1212@gmail.com)<sup>1</sup>, [yudha.ipdn@gmail.com](mailto:yudha.ipdn@gmail.com)<sup>2</sup>

Received: 20-09-2023; Accepted: 18-12-2023; Published Online: 19-12-2023

*\*Corresponding author*

### **ABSTRAK**

Pengangguran merupakan masalah sosial yang sangat krusial dan berdampak pada kerentanan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah pengangguran di Kota Jambi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan merupakan permasalahan serius yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Jambi khususnya melalui instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Usaha Menengah Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengurangi pengangguran di Kota Jambi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran langsung permasalahan yang terjadi di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya dalam melakukan upaya pengurangan pengangguran, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Jambi aktif melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai ketenagakerjaan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung, serta memaksimalkan program dan kegiatan ketenagakerjaan, khususnya di bidang pelatihan. Namun masih banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya sehingga dalam proses penanggulangan pengangguran masih berjalan lambat seperti kurangnya sumber daya manusia di Dinas Tenaga Kerja, koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Jambi, kurangnya tenaga kerja, dan kurangnya tenaga kerja. keahlian dan ketrampilan pencari kerja serta terbatasnya kesempatan kerja.

Kata kunci: Peran; Pengangguran; Dinas Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi

### **ABSTRACT**

*Unemployment is a very crucial social problem and has an impact on social vulnerability. This research is based on the number of unemployment in Jambi City which has increased from year to year and is a serious problem that must be resolved immediately by the Jambi City Government, especially through related agencies, namely the Office of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Jambi City. This study aims to discuss the role of the Office of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises in reducing*

*unemployment in Jambi City by using descriptive qualitative methods to get a direct picture of the problems that occur in the field through observation, interviews and documentation obtained. The data that has been obtained is analyzed by data reduction techniques, data presentation and conclusion. The results of the study show that in carrying out its role in making efforts to reduce unemployment, the Office of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the City of Jambi is actively conducting outreach to educate the public regarding employment, increasing Human Resources (HR) and supporting infrastructure, and maximizing programs and employment activities, particularly in the field of training. However, there are still many obstacles encountered along with its implementation so that in the process of overcoming unemployment it is still running slowly such as the lack of human resources in the Department of Labor, cooperatives and small and medium enterprises in Jambi City, lack of expertise and skills of job seekers and limited job opportunities.*

*Keywords: Role; Unemployment; Office of Manpower; Cooperatives and Small and Medium Enterprises Jambi City*

## **PENDAHULUAN**

Penduduk merupakan komponen penting dalam suatu Negara dan juga merupakan fondasi dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengerahkan segala upaya yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....” (Republik Indonesia, 1945). Penduduk yang mencukupi dan mendapat penghidupan yang layak di segala bidang merupakan tanda penduduk yang

sejahtera. Mulai dari aspek kehidupan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 278,8 juta tersebut dapat diuraikan jumlah tersebut terdiri dari 49,7 persen atau sekitar 138.303.472 jiwa penduduk perempuan dan 50,3 persen atau sekitar 135.576.278 jiwa penduduk laki-laki. Sementara itu, melihat dari produktifitas penduduk Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia memiliki penduduk 208,54 juta penduduk usia kerja per Februari 2022. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut jumlah angkatan kerja atau penduduk usia kerja yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran hanya 144,01 juta jiwa yang artinya jumlah tersebut mencapai 69,06 persen dari total penduduk usia kerja. Dengan jumlah penduduk yang besar,

Indonesia juga menghadapi banyak permasalahan sosial lainnya dan diantaranya yang paling menonjol adalah masalah pengangguran. Disamping itu, laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat turut mempengaruhi akan pengangguran hal ini dapat dilihat dari sensus penduduk tahun 2010-2020 yang diketahui bahwa penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen per tahun antara 2010 sampai 2020, menurut data dari Badan Pusat Statistika (BPS) yang juga memperhitungkan migrasi, tingkat kelahiran, dan tingkat kematian (Badan Pusat Statistik RI, 2022).

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk Indonesia, antara lain program Keluarga Berencana (KB) yang telah berlangsung sejak tahun 1980, pemerataan pembangunan ditujukan untuk daerah tertinggal, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi, dan perluasan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja (Welianto, 2020). Program-program yang diupayakan pemerintah tersebut saat ini masih gencar disosialisasikan oleh pemerintah walaupun pada kenyataannya hasilnya belum terlalu maksimal dan masih harus dilakukan

peningkatan agar sekiranya bisa mengatasi masalah-masalah yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang cepat. Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah akibat adanya kepadatan penduduk mengenai tenaga kerja dan pengendalian penduduk utamanya dalam mengatasi masalah pengangguran. Kota Jambi yang terkenal dengan ikonnya sungai Batanghari merupakan ibukota dari Provinsi Jambi. Kota Jambi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan administratif dari Provinsi Jambi tentunya menjadi tujuan bagi para penduduk dari berbagai daerah diluar Kota Jambi atau kabupaten sekitarnya untuk mengadu nasib. Kota Jambi menduduki peringkat 29 sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak. Dengan luas wilayah sekitar 205,38 km<sup>2</sup>, Kota Jambi pada tahun 2021 mencatat jumlah penduduknya sebanyak 612.162 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan. Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mencatat bahwa penduduk usia produktif di Kota Jambi mencapai 71,42 persen dari jumlah penduduk Kota Jambi atau sekitar 431.897 jiwa. Dan terdapat 147.287 jiwa penduduk usia belum produktif atau 24,4 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Jambi. Sedangkan penduduk usia tidak Produktif berjumlah 4,14 persen dari jumlah

penduduk Kota Jambi atau setara dengan 25.014 jiwa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kota Jambi 2021 Kota Jambi memiliki angkatan kerja yang terdiri dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang sudah melewati proses pendidikan seperti dosen, guru, perawat, dokter, dan polisi. Adapun tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang sudah melampaui proses pelatihan dalam bidang tertentu seperti tukang bangunan, pengrajin mebel, penjahit, montir sedangkan tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih adalah tenaga kerja yang tidak melewati proses pendidikan maupun pelatihan seperti tukang parkir, kuli panggul, dan tukang sapu. Melihat hal tersebut, berdasarkan survei angkatan kerja di Kota Jambi, masih banyak tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih (Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2021). Pemerintah Kota Jambi harus mengatasi permasalahan ini karena jika tidak akan menjadi permasalahan baru yang menambah angka pengangguran di era bonus demografi yang juga akan dihadapi Kota Jambi nantinya.

Kota Jambi sebagai pusat dari Provinsi Jambi tentunya memiliki masalah kependudukan dalam hal ini adalah pengangguran. Pada Tahun 2021 Badan

Pusat Statistika Kota Jambi mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi sebanyak 31.375 dari total 466.345 tenaga kerja di Kota Jambi yang diuraikan secara rinci pada tabel berikut:

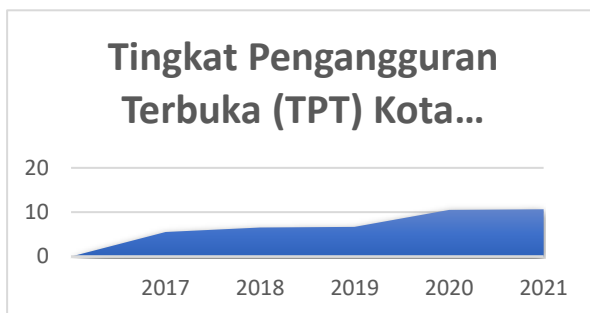
**Tabel 1. Parameter Ketenagakerjaan di Kota Jambi Tahun 2021**

NO	PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	BEKERJA	PENGANGGURAN
1.	≤ Sekolah Dasar (SD)	46.586	4.829
2.	Sekolah Menengah Pertama	40.481	5.195
3.	Sekolah Menengah Atas	112.464	15.200
4.	Perguruan Tinggi	63.443	6.151
<b>JUMLAH</b>		<b>262.974</b>	<b>31.375</b>

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2021)

Berdasarkan tabel 1 parameter ketenagakerjaan Kota Jambi 2021 diatas, diketahui bahwa tingkat pengangguran di Kota Jambi masih tinggi. Lulusan Sekolah Menengah Atas menjadi penyumbang terbesar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan keseluruhan jumlah pengangguran dari jumlah angkatan kerja yang dalam hal ini belum mempunyai pekerjaan ataupun dalam proses mendapatkan pekerjaan. Ini menjadi permasalahan tenaga kerja yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin bertambahnya lulusan sekolah sebagai

angkatan kerja tiap tahunnya tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang memadai turut mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi (Rizaty, 2021). Di tahun 2021, Kota Jambi mengalami kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan berada di angka 10,6 persen seperti yang dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Jambi tahun 2017-2021 pada grafik dibawah ini:



Sumber: (Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2021)

**Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jambi 2017-2021**

Merujuk gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa Kota Jambi secara konsisten mengalami kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) setiap tahunnya. Di tahun 2017 Kota Jambi memiliki jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di angka 5,55%. Di tahun berikutnya melonjak lagi ke angka 6,56% dan di tahun 2019 naik kembali menjadi 6,72%. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu mencapai angka 10,49% dan pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi naik di angka 10,66%.

Kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini dapat berpengaruh terhadap berbagai sektor sosial di Kota Jambi salah satunya kemiskinan. Karena pengangguran dan kemiskinan merupakan hal yang saling mempengaruhi satu sama lainnya dimana penduduk yang menganggur pastinya tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya pasti miskin Selama periode 2019-2021 persentase kemiskinan di Kota Jambi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Komoditi pangan serta kebutuhan lainnya yang melonjak mejadi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Kota Jambi menyusul kebijakan pemerintah dalam kenaikan BBM.

Untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi melaksanakan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja di Balai Latihan Kerja dan Produktivitas (BLKP) Jambi. Melalui program ini para pencari kerja dan perusahaan dimudahkan untuk saling dipertemukan dalam program yang dibuat ini. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi juga berupaya mendorong generasi muda melalui berbagai sosialisasi agar bisa menjadi pencipta lapangan kerja dan tidak melulu mengincar menjadi pegawai. Sehingga selain membuka peluang pekerjaan bagi mereka sendiri tetapi juga

memberikan kesempatan kerja untuk orang lainnya.

Namun pada kenyataannya program-program yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi masih belum maksimal dan belum bisa menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Banyak faktor yang menghambat berjalannya program-program tersebut yang pada akhirnya belum bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Jambi (Sitompul, 2020). Melihat dari hal tersebut, terlihat bahwa pemerintah Kota Jambi khususnya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi belum sepenuhnya mempersiapkan dengan matang untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kota Jambi.

## TINJAUAN TEORITIS

### a. Peran

Dalam organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan bukti tertulis dalam bentuk dokumen yang berisi persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu tugas yang diemban. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi direalisasikan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas.

Oleh sebab itu, dalam mengemban peranannya seseorang atau lembaga uraian tugas atau uraian jabatan merupakan pedomannya.

Selain itu dikemukakan juga oleh Achmad & Horoepoetri, (2003: 46) dalam peranan terdapat beberapa dimensi, yaitu:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Yang berarti peran merupakan suatu kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan diberlakukannya.
- 2) Peran sebagai strategi. Yang berarti bahwa peran merupakan rangkaian upaya dalam menarik simpati untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Peran ini mengandung paham apabila keputusan dan kepedulian dari masyarakat dapat di inisiasi dengan baik maka semakin baik pula keputusan yang dibuat.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Yang berarti bahwa peran menjadi sarana untuk mengumpulkan berbagai pendapat dan masukan guna dijadikan landasan dalam mengambil keputusan agar terwujudnya nilai responsive dan responsible dari pemerintah untuk masyarakat.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran menjadi cara untuk menciptakan suatu ruang mediasi dalam penyelesaian suatu masalah dan konflik melalui pencapaian kesepakatan dari berbagai pendapat-pendapat yang ada.
- 5) Peran sebagai terapi. Yang berarti bahwa peran dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan suatu organisasi atau individu dalam masyarakat yang merasa tidak berdaya, terabaikan, tidak percaya diri dan merasa terkucilkan.

## **b. Tenaga Kerja**

Menurut Tan Goan Tiang dalam Mantra (2000: 224) Tenaga kerja (*man power*) adalah sebagian besar dari penduduk yang termasuk dalam suatu proses atau kegiatan ekonomi. Tan Goan Tiang dalam Mantra (2000: 224) juga menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah dimana kegiatan tersebut menghasilkan sebuah barang atau jasa yang dibayar dengan upah.

Sementara Simanjuntak (1986: 17), tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang sudah atau sedang aktif bekerja, baik yang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja mencakup tenaga kerja/buruh yang masih terikat dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum aktif bekerja.

Dapat disimpulkan tenaga kerja merupakan penduduk yang berada di usia produktif dan aktif serta mampu bekerja. Terlepas dari semua indikator dalam tenaga kerja, apabila seseorang secara mampu bekerja maka ia dapat dikatakan sebagai tenaga kerja.

## **c. Pengangguran**

Menurut Halim (2018: 82) pengangguran atau tuna karya adalah sebutan untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang dalam proses mencari

kerja, bekerja dengan intensitas kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Dijelaskan juga bahwa pengangguran disebabkan jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga tidak mampu menyerapnya.

Sedangkan Mulyadi (2003: 60) dalam mendefinisikan angka pengangguran merupakan angka yang menjelaskan tentang jumlah tenaga kerja yang sedang dalam proses mencari pekerjaan. Adapun jenis-jenis pengangguran menurut Mulyadi, yaitu:

- 1) Pengangguran Terbuka (*open unemployment*)  
Pengangguran terbuka merupakan aspek dari angkatan kerja yang tidak atau belum mempunyai pekerjaan dan sedang dalam proses mendapatkan pekerjaan.
- 2) Pengangguran Tidak Kentara (*disngused unemployment*)  
Pengangguran tidak kentara merupakan angkatan kerja yang dari sisi produktivitasnya adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan namun dimasukkan dalam suatu pekerjaan.
- 3) Pengangguran Friksional  
Pengangguran Friksional merupakan keadaan pengangguran dimana penyebabnya adalah seseorang yang harus berstatus pengangguran akibat berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya dan menunggu sampai pekerjaan tersebut didapatkan kembali.
- 4) Pengangguran Struktural  
Pengangguran structural adalah pengangguran yang kondisi tenaga kerja yang sedang mencari kerja tidak

cocok dengan struktur dan kondisi permintaan di lapangan baik dari segi keahlian, keterampilan maupun lokasi.

- 5) Setengah Pengangguran (*underemployment*)  
Setengah pengangguran adalah pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh seseorang berbeda dengan pekerjaan yang secara kualifikasi nya mampu ia kerjakan.
- 6) Setengah menganggur yang terlihat (*visible underemployment*)  
Setengah menganggur yang terlihat adalah seseorang yang memiliki pekerjaan tidak tetap dan terpaksa melakukan pekerjaan yang bukan keinginannya ataupun pekerjaan tersebut mempunyai jangka waktu tertentu.
- 7) Setengah Menganggur Yang Tidak Terlihat (*invisible underemployment*)  
Setengah menganggur yang tidak terlihat merupakan seseorang yang sudah bekerja akan tetapi menerima pendapatan yang tidak mencukupi dan tergolong rendah serta kondisi dimana pekerjaan tersebut tidak memberikan seseorang kesempatan untuk berkembang dalam keahliannya.

Merujuk pendapat di atas maka diketahui bahwa pengangguran adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja dan dalam usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan dan dalam proses mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah atau keuntungan. Dan penulis akan meneliti secara khusus bagaimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang secara pengertian merupakan jenis pengangguran yang seringkali ditemukan dan biasanya penyumbang terbesarnya adalah lulusan

baru dar universitas yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun sedang mencari pekerjaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif akan menghasilkan data-data yang didapatkan melalui wawancara serta dokumen-dokumen, gambar serta catatan di lapangan yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Sejalan dengan uraian tersebut, maka peneliti memutuskan akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dalam meneliti Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Jambi Provinsi Jambi.

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu bagian penting dalam proses penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Sugiyono (2017: 194) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data dilihat dari cara dan tekniknya dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya. Dari penjelasan tersebut peneliti akan menggunakan cara pengumpulan data dengan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.



Teknik analisis data merupakan suatu kegiatan mengolah data yang telah dihimpun selama penelitian untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan dan menjawab permasalahan melalui data yang sudah disempurnakan. Menurut Sugiyono (2014: 244) analisis data adalah suatu proses sistematis dalam menyusun data yang diperoleh dengan menganalisis data atau informasi yang telah didapatkan baik melalui wawancara, pengamatan atau observasi maupun dokumentasi untuk mendapatkan suatu hasil akhir berupa kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kota Jambi**

Dalam organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan bukti tertulis dalam bentuk dokumen yang berisi persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu tugas yang diemban. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi direalisasikan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas. Oleh sebab itu, dalam mengemban peranannya seseorang atau lembaga uraian tugas atau uraian jabatan merupakan pedomannya.

Dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Jambi, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Walikota Jambi Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi berperan dalam merumuskan kebijakan serta melakukan program dan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kota Jambi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan dalam menangani permasalahan pengangguran kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta kebijakan lainnya (Presiden Republik Indonesia, 2020). Adapun dalam realisasinya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi berperan sebagai pengantar kerja dalam menyelenggarakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyebarluasan informasi program bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
- 2) Memfasilitasi calon penerima bantuan untuk melakukan pendaftaran ke aplikasi Bizhub
- 3) Menerbitkan Surat Keterangan/Keputusan Pembentukan Kelompok atas permohonan kelompok masyarakat
- 4) Proses pendampingan prosedur

pencairan dana bantuan, pelaksanaan bantuan sesuai dengan RAB, penggunaan, pelaporan serta penatausahaan dana bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

- 5) Melaksanakan koordinasi dengan direktorat bina perluasan kesempatan kerja Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pendamping dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, turut dijelaskan bahwa:

“Program pelatihan yang diberikan kepada para tenaga kerja ini dilakukan agar dapat meningkatkan kompetensi serta daya saing tenaga kerja khususnya kepada masyarakat yang sedang mencari kerja. Dan pelatihan ini pun bermacam-macam mulai dari pelatihan kewirausahaan, pelatihan komputer, pelatihan desain grafis, pelatihan tata rias, pelatihan menjahit, pelatihan perhotelan, dan lainnya dengan tujuan nantinya masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan angka pengangguran di Kota Jambi dapat berkurang”.

Dalam Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas berperan sebagai Pembina, mediator, dan pembimbing dalam hubungan industrial yang juga berarti bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi menjadi penyedia layanan bagi sebuah perusahaan yang berkenaan dengan permasalahan hubungan kerja baik antara

perusahaan dan karyawan maupun perusahaan dan masyarakat serta menjamin bahwa hak dan kewajiban tenaga kerja seimbang dan berjalan semestinya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada hari senin, 16 Januari 2023 bertempat di ruang kerja beliau mengatakan bahwa:

“Jadi bidang kami ini tugasnya berkaitan dengan tenaga kerja, perusahaan yang sedang bekerja dan berhenti bekerja. Kami selalu berupaya dalam mensosialisasikan tentang bagaimana membina suatu hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan karyawannya”

Dari hasil observasi yang ditemukan

selama di lapangan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi masih hanya berupa peraturan yang mengatur hal-hal umum tentang ketenagakerjaan. Untuk kebijakan lainnya yang mengatur khusus tentang permasalahan pengangguran sendiri sampai saat ini belum ada. Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi saat dilakukan wawancara pada hari kamis tanggal 19 Januari 2023 di ruang kerja kepala dinas, beliau mengatakan:

“Untuk sejauh ini kebijakan khusus terkait dengan pengangguran di Kota Jambi belum ada, namun segala upaya dan pelaksanaan terkait dengan mengatasi permasalahan pengangguran masih berpedoman kepada kebijakan dan peraturan

umum tentang ketenagakerjaan. Baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah lainnya. Namun kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan ini, melihat dari statistik yang ada pengangguran di Kota Jambi mengalami kenaikan beberapa tahun ini. Itulah yang menjadi fokus Pemerintah Kota Jambi saat ini agar perekonomian di Kota Jambi juga dapat membaik”.

Dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi yaitu dapat teratasi permasalahan pengangguran di Kota Jambi tentunya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi memiliki strategi-strategi khusus. Strategi ini merupakan langkah awal dari Dinas untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang perlu diambil untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengangguran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas, Beliau menyampaikan bahwa:

“Strategi-strategi khusus yang kami punya adalah menekankan untuk para pencari kerja agar meningkatkan kompetensi dan *skill* mereka melalui kegiatan pelatihan yang kami buat. Hal-hal seperti ini yang sekiranya dapat membantu mengatasi pengangguran dengan peningkatan kualitas pencari kerja sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja baik sektor formal maupun informal. Selain itu kami gencar mensosialisasikan kepada perusahaan yang berkegiatan di Kota Jambi mengenai Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Tenaga Kerja khususnya pasal 12 untuk wajib melaporkan lowongan yang tersedia sehingga dapat membantu pencari kerja di Kota Jambi khususnya untuk mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan” (Pemerintah Kota Jambi, 2016).

Dari wawancara yang dilakukan, didapatkan fakta bahwa program-program pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi yang dilaksanakan setiap tahunnya dan terbuka bagi seluruh masyarakat umum di Kota Jambi tanpa dipungut biaya apapun. Adapun berbagai pelatihan yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi tentu saja melalui berbagai persiapan mulai dari perencanaan hingga ke pelaksanaannya. Pelatihan biasanya diumumkan kepada masyarakat umum secara offline dan online, dimana offline melalui banner atau spanduk yang dipasang di depan kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi sedangkan secara online bisa diakses melalui media elektronik yaitu melalui website maupun Instagram resmi dari dinas tersebut.

Komunikasi merupakan salah satu hal penting dalam Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi menjalankan perannya dalam mengatasi pengangguran. Bentuk dari peran sebagai alat komunikasi adalah bagaimana Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi memperluas penyebaran informasi

serta mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai pasar kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 17 Januari 2023 dengan Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja bertempat di ruangan Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja beliau mengatakan:

“Untuk saat ini kita berupaya dalam mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai pasar kerja baik di dalam kota maupun di luar kota jambi, dengan melalui media elektronik seperti instagram, website dinas, dan pusat informasi layanan terpadu mengenai ketenagakerjaan di *Job Center* yang diresmikan 2022 lalu”.

Hal-hal yang biasanya menjadi konflik dalam hubungan kerja tersebut adalah perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, upah karyawan yang tidak sesuai ataupun menunggak dan Karyawan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Hasil wawancara bersama Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada hari Jum’at, 13 Januari 2023 selaku bertempat di ruangan Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, dan Pengawasan Koperasi, beliau mengatakan, “Kita mengupayakan agar dalam penyelesaian konflik, perselisihan dan permasalahan hubungan industrial ini dapat terlebih dahulu dirundingkan secara kekeluargaan antara perusahaan dan

karyawan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kita berperan menjadi penengah ataupun mediator yang dapat menampung aspirasi maupun masukan dari kedua belah pihak untuk dicarikan solusinya dan dapat meminimalisir atau kalau perlu membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”. Sesuai dengan perannya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan di Kota Jambi. Hal ini adalah langkah bagi Dinas untuk mengantisipasi konflik dalam hubungan kerja yang dapat berakibat ke terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi pada hari Selasa 17 Januari 2023 bertempat di ruang kerja beliau sendiri yang mengatakan:

“Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi untuk saat ini belum mempunyai layanan yang membangun mental serta mendorong motivasi masyarakat secara psikologis dalam persaingan kerja. Namun, seiring dengan berjalannya waktu kami berharap bahwa kami bisa semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik seperti yang diharapkan masyarakat. Ini juga merupakan ide yang bagus sebenarnya, namun karena kondisi keterbatasan SDM, anggaran dan lain-lain kami pun memerlukan waktu untuk dapat merealisasikan apa yang menjadi solusi untuk kendala yang

dihadapi oleh baik pemerintah maupun masyarakat dalam masalah pengangguran”.

Permasalahan lainnya yang kerap dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi adalah pola pikir dan pandangan masyarakat yang memilih-milih pekerjaan dan biasanya pekerjaan yang dipilih adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Putra Ariantama beliau mengatakan,

“Kami sebagai masyarakat yang menerima pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi sangat antusias dengan berbagai program yang dilakukan oleh Dinas untuk membantu kami dalam mendapatkan pekerjaan. Harapan kami bahwa Dinas juga dapat memberikan dukungan secara psikologis kepada kami dalam proses persaingan mendapatkan pekerjaan hingga melalui bekal ini kami bisa lebih percaya akan kemampuan diri kami”.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dengan wawancara bersama masyarakat pencari kerja, sebenarnya masyarakat berharap bahwa melalui pendampingan baik secara psikis maupun fisik oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi masyarakat merasa terbantu dan terdorong untuk bisa bangkit dari keputusasaan dalam mencari pekerjaan.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi Dalam Mengurangi Angka Pengangguran**

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi maka Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023, Beliau mengatakan bahwa:

“Di Kota Jambi sendiri masih kurang jumlah perusahaan yang dapat menyerap tenaga kerja di segala bidang pekerjaan. Padahal sebenarnya akan sangat membantu dalam menekan angka pengangguran apabila keberadaan perusahaan seperti itu beraktivitas di Kota Jambi. Permasalahan lainnya yang kami hadapi sejauh ini adalah ada beberapa infrastruktur pelatihan yang masih kurang memadai misalnya sarana prasarana untuk melaksanakan pelatihan di bidang perkebunan dan bidang market atau penjualan yang seharusnya bisa terlaksana dengan ketersediaan lahan yang dapat dipakai untuk melaksanakan pelatihan”.

### **a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Yang Ada**

Dari hasil temuan di lapangan ditemukan bahwa terkadang tidak semua pegawai yang ada di lingkup Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi merupakan orang-orang yang memang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Sehingga mau tidak mau mereka yang bekerja pun mengalami proses

yang lama untuk dapat memahami tugas serta fungsi masing-masing dibandingkan mereka yang memang sudah memiliki dasar untuk menangani permasalahan pengangguran. Hal ini juga turut disebabkan oleh tidak adanya penerimaan CPNS maupun PPPK beberapa tahun terakhir sehingga penyaringan dan penempatan untuk ahli dalam bidang ketenagakerjaan pun sangat kurang, padahal pengangguran merupakan permasalahan krusial yang harus segera diatasi.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Mengikuti Program Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

Peningkatan jumlah pengangguran juga merupakan akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi. Padahal dengan adanya data yang dimiliki Dinas mengenai jumlah pencari kerja akan mempermudah Dinas dalam merancang berbagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran seperti melakukan *Job Matching* terhadap kebutuhan pasar kerja yang ada dan membimbing pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian melalui program-program terencana dari Dinas. Berikut data mengenai pencari kerja

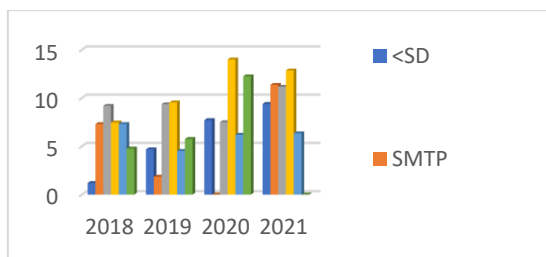
terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi:

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Pencari Kerja Yang Terdaftar Di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi Tahun 2022**

Pencari Kerja di Kota Jambi	Pencari Kerja Terdaftar	Penempatan	Sisa Pencari Kerja	Persentase Penempatan Terhadap Pencari Kerja Terdaftar
303.517	1.417	587	830	41,43%

Sumber: Disnakerkopukm Kota Jambi (diolah peneliti sendiri)

Merujuk tabel 2 diatas didapat data bahwa jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi sangat jauh dibawah dari jumlah keseluruhan pencari kerja di Kota Jambi yaitu dari 303.517 jumlah pencari kerja di Kota Jambi hanya 1.417 pencari kerja yang terdaftar. Selain itu, tidak sampai 50% dari jumlah pencari kerja terdaftar yang sudah mendapatkan penempatan kerja atau dapat diartikan bahwa jumlahnya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pencari kerja yang sudah terdaftar saja masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan.



Sumber: Disnakerkopukm Kota Jambi  
(diolah oleh peneliti sendiri)

### **Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Kota Jambi Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018-2022**

Merujuk diagram diatas diketahui bahwa lulusan SMK, SMTP dan Universitas menjadi penyumbang terbesar untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dan lulusan SMK, SMTP serta Universitas ini ternyata belum dapat banyak terserap dalam pasar kerja, terlihat dari besarnya TPT lulusan pendidikan ini dibandingkan golongan lulusan lainnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa gelar sarjana saja tidak cukup untuk menjadi modal pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan melainkan harus juga disertai dengan keterampilan, skill, kompetensi dan keahlian yang dapat diperoleh melalui pelatihan dan peningkatan produktivitas yang dilakukan oleh Dinas.

#### c. Terbatasnya Kesempatan Kerja

Dari wawancara yang dilakukan pada Kamis, 19 Januari 2023 bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM

Kota Jambi, Bapak Komari, SH, MH, beliau mengatakan:

“Dengan terjadinya kelulusan setiap tahun baik di taraf SMA sederajat ataupun Perguruan Tinggi menambah jumlah angkatan kerja tiap tahunnya. Namun untuk saat ini ketersediaan lapangan pekerjaan tidak cukup memadai bagi para fresh graduate yang siap terjun ke dunia kerja ini. Ditambah lagi banyak perusahaan yang bangkrut saat pandemi Covid-19 kemarin berimbas kepada semakin minimnya kesempatan kerja bagi mereka”.

Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi peningkatan angkatan kerja yang setiap tahunnya bertambah dikarenakan tiap tahun juga terjadi kelulusan dari perguruan tinggi maupun SMA atau sederajat.

### **3. Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi Dalam Mengurangi Angka pengangguran**

Penulis melakukan wawancara dengan Staf Seksi Perluasan Kesempatan Kerja, Bapak Budhi Setyawan beliau mengatakan,

“Sosialisasi yang kami berikan adalah dalam bentuk pemberian ilmu tentang proses dalam mendapatkan pekerjaan serta bekal untuk bersaing di dunia pekerjaan. Kami juga gencar melakukan sosialisasi untuk mengubah stigma masyarakat yang terlalu berambisi menjadi PNS. Dan sosialisasi ini menyasar kepada masyarakat yang baru akan terjun ke

dunia kerja ataupun yang berulang kali gagal dalam mendapatkan pekerjaan”.

Hal ini juga dijelaskan oleh ibu Ramayanti, SH selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Beliau mengatakan bahwa,

“Upaya yang kita lakukan dalam hal ini adalah mengusahakan agar bagaimana perusahaan tidak melakukan PHK kepada karyawannya yang dapat berimbas kepada pengangguran. Sebenarnya bidang kita selalu berusaha mensosialisasikan tentang bagaimana hak dan kewajiban tenaga kerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan. Perselisihan atau permasalahan antara karyawan dan perusahaan juga kita usahakan agar jangan langsung mengambil tindakan PHK dan kita sebagai mediator dalam hal ini mengupayakan untuk membuat sebuah mufakat melalui musyawarah. Dan walaupun PHK merupakan hak dari perusahaan tetapi kami dalam hal ini mensosialisasikan kepada perusahaan agar terlebih dahulu memberikan peringatan pertama kedua dan ketiga sebagai bentuk pembinaan kepada karyawannya agar mereka dapat berbenah diri. Selanjutnya untuk karyawan pun kita memberikan bimbingan agar dapat mengimbangkan hak dan kewajiban dimana agar terlebih dahulu melaksanakan kewajiban agar hak nya dapat dipenuhi oleh perusahaan. Yang jelasnya kami lebih menekankan kepada perusahaan dan pekerja-pekerja dalam hal hubungan kerja agar tetap berjalan harmonis agar meminimalkan terjadinya PHK”.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Komari, SH, MH pada hari Kamis, 19

Januari 2023 diruang kerjanya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi bahwa,

“Kami terus berupaya melakukan perubahan-perubahan kecil maupun besar dalam hal ini SDM sebagai penggerak dalam mengatasi pengangguran dengan meningkatkan kualitas pegawai kami. Melalui diklat, pembinaan, bimbingan, dll kami berharap bahwa ke depannya kami bisa terus meng-upgrade diri untuk bisa mencapai tujuan dari Dinas kami. Kami juga berharap bahwa kedepannya kami dapat memberdayakan pegawai kami sendiri untuk menjadi tenaga pelatih di berbagai program pelatihan”.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi sudah banyak melaksanakan program terencana tiap tahunnya. Adapun program-program tersebut berupa program pembekalan, program pelatihan tenaga kerja, forum diskusi ketenagakerjaan, Job Matching, dan program lainnya. Namun untuk saat ini ada program yang sudah 3 tahun tidak berjalan yaitu Pasar Kerja (Job Fair) dikarenakan pandemi covid-19 yang lalu serta tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaannya. Padahal Pasar Kerja (Job Fair) ini merupakan salah satu program yang paling banyak menyerap tenaga kerja baik di sektor formal maupun informal.

Hal ini didapat berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja,



bapak Ardiansyah, S.STP beliau mengatakan,

“Program dan kegiatan yang kami lakukan berkaitan dengan pengangguran sendiri berlandaskan hukum kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang didalamnya sudah sangat jelas mengatur tentang segala program ketenagakerjaan secara spesifik. Oleh sebab itu, kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah membuat program dan kegiatan yang mendukung untuk menekan angka pengangguran di Kota Jambi. Selain program pelatihan yang bertujuan untuk menambah keterampilan pencari kerja, dilakukan juga berbagai forum diskusi, bimbingan, *Job Matching*, dan lainnya. Untuk program yang mengalami hambatan untuk saat ini adalah program Bursa Kerja (*Job Fair*) yang biasanya diagendakan diadakan tiap tahun, namun sudah 3 tahun terakhir program ini tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut, padahal *Job Fair* ini sangat membantu dalam menyerap tenaga kerja’.

Untuk mengatasi hal ini Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi juga bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Provinsi Jambi dalam program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Kerja untuk meningkatkan kompetensi serta daya saing dari para pencari kerja di Kota Jambi. Pelatihan ini dilakukan dengan metode klasikal dan praktek langsung serta dilaksanakan selama 15 hari atau 120 jam pelajaran. Program dan kegiatan ini disiapkan mulai dari pembentukan panitia,

pelaksanaan kegiatan proses seleksi dan rekrutmen, pembuatan SK, persiapan tempat dan penyediaan ATK peserta pelatihan. Dari hasil observasi di lapangan, terlihat bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi selalu berupaya untuk mengadakan program dan kegiatan yang terencana dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan program serta kegiatan ini juga menjadi sarana juga untuk menerima berbagai masukan dan pendapat dari lembaga terkait yang berhubungan dengan ketenagakerjaan

## KESIMPULAN

1. Peran dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi masih belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hanya tiga dimensi yang sudah memenuhi dan dianggap baik selanjutnya Peran sebagai alat terapi belum dapat mencapai kriteria efektif, hal ini dilihat dari belum adanya layanan konseling ataupun program yang berkaitan dengan penguatan mental dan peningkatan motivasi dan semangat pencari kerja untuk bersaing di lapangan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi dalam

mengurangi angka pengangguran terbagi menjadi tiga, yaitu Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini pegawai yang jumlahnya masih sangat kurang untuk menjalankan tugas serta fungsi dari Dinas dalam mengatasi pengangguran serta keadaan Infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi masih jauh dari memadai untuk mendukung kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi untuk dalam rangka menekan angka pengangguran. Terbatasnya kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja di Kota , Serta kebutuhan pasar kerja yang sangat berkualifikasi tinggi sementara keadaan angkatan kerja yang skill dan kompetensinya tidak memenuhi kriteria menjadikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan juga sedikit.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi dalam mengurangi angka pengangguran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi menekankan dalam semua aktivitas yang berhubungan dengan ketenagakerjaan agar berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja.
- b. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi adalah dengan memberdayakan pegawainya sebagai tenaga pelatih dengan terlebih dahulu memeberikan pelatihan kepada pegawai yang ke depannya dapat menjalankan program pelatihan yang dibuat oleh Dinas. Selain itu peningkatan infrastruktur dengan dibangunnya *Job Center* sebagai wadah untuk melayani masyarakat mengenai ketenagakerjaan.
- c. Memaksimalkan program dan kegiatan ketenagakerjaan yang selama ini sudah berjalan agar lebih berfokus tentang mengatasi permasalahan pengangguran yang ada di Kota Jambi dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah.

## SARAN

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi diharapkan dapat mengusulkan pembuatan kebijakan khusus terkait pengangguran agar lebih berfokus kepada bagaimana menangani pengangguran di Kota Jambi. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi agar lebih memaksimalkan sosialisasi bagi masyarakat agar edukasi mengenai ketenagakerjaan khususnya mengenai bekal bagi masyarakat yang akan memasuki dunia kerja dapat tersampaikan secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi diharapkan dapat menambah jumlah pegawai untuk menggerakkan roda pelayanan di bidang ketenagakerjaan, serta lebih memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada agar bisa berkontribusi lebih dalam mengupayakan hal-hal yang dilakukan dinas dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kota Jambi.

## DAFTAR REFERENSI

- Achmad, S., & Horoepoetri, A. (2003). *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*. Walhi.
- Badan Pusat Statistik Kota Jambi. (2021). *Ketenagakerjaan Kab-Kota 2020-2022*.  
<https://jambi.bps.go.id/indicator/6/844/1/ketenaga-kerjaan-kab-kota.html>
- Badan Pusat Statistik RI. (2022). *Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan*.  
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkatpengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-289-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Halim, M. A. (2018). *Teori Ekonomi Makro*. Mitra Wacana Media.
- Mantra. (2000). *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah Kota Jambi. (2016). *Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja*.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun*

- 2020 Tentang Cipta Kerja.*
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- Rizaty, M. A. (2021). *Harapan Lama Sekolah Indonesia Naik Jadi 13,08 Tahun pada 2021.* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/16/harapan-lama-sekolah-indonesia-naik-jadi-1308-tahun-pada-2021>
- Simanjuntak, J. P. (1986). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sitompul, N. M. (2020). *Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kota Jambi Provinsi Jambi (Nomor July).* Artikel Tugas Akhir: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi dan R&D).* Alfabeta.
- Welianto, A. (2020). *Kepadatan Populasi: Dampak dan Pengaruhnya.* <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/04/160000369/kepadatan-populasi-dampak-dan-pengaruhnya?page=all>